BAB V
DISKUSI, KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.

A. Diskusi tentang hasil penelitian.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang diungkap pada bab IV di atas, maka dalam diskusi ini akan diuraikan masalah-masalah yang ditemukan dari hasil penelitian melalui studi dokumentasi, wawancara, dan angket. Hasil penelitian melalui angket pada khususnya, didasarkan pada hasil jawaban (respon) dari pendapat tokoh masyarakat tentang tingkat pengetahuan dan pemahamannya terhadap program KB, jawaban tentang alasan tokoh ingin terlibat dalam kegiatan program KB, dan jawaban/respon tokoh masyarakat tentang intensitas keterlibatannya dalam kegiatan program KB. Dengan demikian penelitian ini berbentuk penelitian pendapat, bukan didasarkan pada tindakan tokoh dalam keterlibatannya pada kegiatan program KB.

1. Diskusi hasil studi dokumentasi.

Masalah-masalah yang ditemukan dari hasil studi dokumentasi adalah sebagai berikut :

a. Laju pertumbuhan penduduk kecamatan Kroya 1988/89; 0,58%, yaitu di atas laju pertumbuhan penduduk tingkat kabupaten Cilacap tahun 1987/1988 sebesar 0,24 %. Data ini dapat dilihat pada bab IV, tabel 2 dan 5, halaman 104 dan 108-109.

Laju pertumbuhan sebesar 0,58 % dapat dikatakan masih tinggi, apabila dihubungkan dengan masalah-masalah kependudukan lainnya, misalnya tingkat kepadatan penduduk untuk kecamatan Kroya telah mencapai 13,65 jiwa/ha, dengan income perkapita yang relatif masih rendah, yaitu sebesar Rp.359.330,-

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan Kroya dalam rangka mengatasi masalah kependudukan pada umumnya dan masalah laju petumbuhan penduduk pada khususnya, antara lain dengan menekan laju pertumbuhan tingkat fertilitas melalui pemantapan para peserta KB aktif, dan mencari akseptor baru.

Keberhasilan dalam menekan pertumbuhan tingkat fertilitas dari 23/1000 penduduk menjadi 11/1000 penduduk, baru tercapai 14/1000 penduduk. Data ini dapat dilihat dari tabel 5 bab IV, halaman 108-109 tentang angka kelahiran bayi 1988/1989, yaitu sebesar 1142/83681 x 1000 = 13,64 bayi.

Upaya dalam mencari akseptor baru, tahun 1987/1988 baru mencapai 59,72 % dari target sebesar 1733, dan pada tahun 1988/1989 baru mencapai 53,51 % dari sisa target sebesar 1267. (lihat tabel 2, 3, dan 4 bab IV). Dengan demikian upaya untuk menekan tingkat kelahiran bayi dengan cara pencapaian target tidak akan tercapai, apabila tidak disertai upaya-upaya lain melalui pendekatan yang bersifat kultural dan edukatif.

b. Berkaitan dengan masalah di atas, yaitu masih banyaknya pasangan usia subur (PUS) yang belum menjadi akseptor KB. Berdasarkan tabel 4 pada bab IV, halaman 107 tentang realisasi akseptor baru kecamatan Kroya tahun 1988/1989, ada 2606 pasangan usia subur yang belum menjadi akseptor KB. Dengan demikian upaya dalam memantapkan akseptor KB aktif dan akseptor baru, baru mencapai 75,47 % yaitu dihasilkan dari (C.U + AB)/ PUS pada tabel 4 halaman 107 laporan

pada bulan Desember 1988, yang berarti masih ada 24, 53 % yang belum tergarap oleh program KB. Masalah ini mengimplikasikan perlunya berbagai pendekatan baru dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap esensi program KB, dan tanggung jawab masyarakat dalam menangani masalah kependudukan pada umumnya.

Apabila pasangan usia subur yang belum menjadi aksep-tor KB yaitu sebesar 24,53 % tidak ditangani segera, maka tingkat kelahirannya tidak dapat dikendalikan, sehingga kemungkinan akan terjadi lonjakan tingkat kelahiran pada tahun-tahun berikutnya. Pendekatan yang digunakan dalam mengatasi masalah tersebut, tidak hanya melalui jalur formal sebagaimana yang telah digariskan oleh program KB, namun dengan pemanfaatan para tokoh masyarakat informal melalui berbagai kegiatan kemasyarakatan.

c. Masalah kepadatan penduduk di kecamatan Kroya, telah mencapai tingkat kepadatan yang perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah setempat pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Tingkat kepadatan telah mencapai 13,65 jiwa/ha, atau tiap jiwa akan menguasai tanah 0,073 ha, yang di dalamnya termasuk tanah sawah dan kering. Menurut laporan Kantor Statistik Kabupaten Cilacap tentang penguasaan tanah pesawahan, bahwa tiap jiwa rata-rata memiliki 0,039 ha, dan penguasaan tanah kering tiap jiwa rata-rata memiliki 0,001 ha. (Cilacap dalam Angka, 1987;163)

Ketiga masalah tersebut, saling berkaitan yang antara satu dengan lainnya tidak dapat dilepaskan. Masalah tersebut akan mempunyai dampak terhadap masalah-masalah kependudukan lainnya, baik berkaitan dengan masalah pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan masalah-masalah lingkungan lainnya.

Salah satu segi dari dampak pertumbuhan penduduk yang tinggi, akan mempunyai pengaruh terhadap upaya orang tua atau masyarakat atau pemerintah dalam hal menyediakan pangan, papan, pendidikan dan fasilitas-fasilitas lainnya yang mendukung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya-upaya tersebut merupakan suatu kewajiban, dan hak bagi anak untuk menuntut suatu kehidupan yang layak untuk kehidupannya kelak.

Untuk meningkatkan kualitas bangsa yang lebih baik dari yang sekarang, kita tidak dapat mengabaikan masalah tersebut di atas. Generasi yang berkualitas, baik fisik maupun mental dan spiritualnya, tidak dapat dilepaskan dengan masalah pangan, sebab kualitas pangan akan mempengaruhi terhadap pertumbuhan fisik maupun mental dan intelektualnya. Demikian pula kesehatan mental dan spiritualnya, akan berkaitan erat dengan papan atau lingkungan tempat tinggal dan pendidikan yang mereka dapatkan. Lingkungan tempat tinggal yang layak, sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan sikap dan nilai-nilai serta kebiasaan-kebiasaan hidup yang sehat.

Pertumbuhan dan perkembangan fisik, intelektual dan mental anak, tidak cukup hanya dengan penyediaan pangan dan papan, tetapi kebutuhan akan pendidikan dalam rangka mengembangkan kepribadian secara optimal melalui berbagai pengetahuan, sikap dan nilai-nilai yang diperoleh baik secara formal maupun informal dan nonformal di lingkungan kehidupan masyarakatnya, adalah sangat fundamental bagi anak.

Ketiga kebutuhan tersebut, merupakan kebutuhan yang sangat esensial bagi kehidupan anak-anak, yang tentunya kebutuhan-kebutuhan tersebut berkaitan erat dengan masalah-masalah lainnya. Pemenuhan ketiga kebutuhan pokok tersebut, berkaitan erat dengan kemampuan masyarakat atau pemerintah untuk menyediakannya. Oleh karena itu, pertumbuhan penduduk yang tinggi akan sangat mempengaruhi terhadap kemampuan orang tua atau masyarakat dan pemerintah dalam upaya meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakatnya.

Upaya untuk mengurangi pertumbuhan penduduk yang tinggi, telah dilakukan oleh pemerintah, pada khususnya melui program kependudukan dan keluarga berencana. Program tersebut, mempunyai tujuan meningkatkan kualitas bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Namun program tersebut, tidaklah mudah dapat diterima oleh masyarakat sebagai perbaikan dan peningkatan kehidupannya, sebab hasil dari program tersebut tidak dengan cepat mudah dilihat keuntungan dan kerugiannya. Untuk mengatasi masalah ini, berbagai metode dan upaya pemerintah telah dilakukan melalui jalur formal mau-

pun non formal. Salah satu alternatif yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah program transmigrasi, yang relatif masih sangat kecil pesertanya, bahkan transmigrasi swakarsa relatif lebih kecil lagi, sebab hal ini berkaitan dengan kemampuan untuk membiayai hidupnya sendiri selama mereka belum mampu menghasilkan produksi kerjanya. Alternatif-alternatif lain yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menyelenggarakan berbagai bentuk pendidikan, terutama pendidikan luar sekolah. Bentuk-bentuk pendidikan non formal tersebut, antara lain : Kelompok Belajar Pendidikan Dasar, Penyuluhan Pertanian, Pengajian-pengajian, Kelompok Belajar Usaha, Kelompok Belajar Tani, PKK, Kelompok Aksep-tor KB, dan berbagai bentuk kelompok belajar lainnya, yang dalam pelaksanaannya melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, baik formal maupun informal.

Dalam rangka upaya meningkatkan kualitas bangsa pada umumnya, dan menyukseskan program kependudukan dan Keluarga Berencana pada khususnya, tidak dapat dilepaskan dengan peranan dari tokoh-tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat formal (sebagai change agent) mempunyai tujuh peranan, yang oleh Everett M. Rogers (1983; 315-316) dijelaskan sebagai berikut :

1). Sebagai pengembang kebutuhan perubahan; yaitu tokoh masyarakat menyadarkan masyarakat bahwa mereka perlu perubahan dalam rangka meningkatkan/mengatasi masalah kehidupannya.

2). Memantapkan hubungan untuk saling memberi informasi; yaitu tokoh masyarakat dapat membina keakraban dengan masyarakat (kliennya), di mana tokoh harus dapat dipercaya, jujur, dan empathi dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya.

3). Mendiagnosis masalah-masalah; yaitu tokoh masyarakat mampu menganalisis situasi problematis masyarakat untuk menentukan cara apa yang dibutuhkan mereka pada saat sekarang dan yang akan datang.

4). Menanamkan kesungguhan untuk perubahan klien (masyarakat); yaitu tokoh masyarakat harus memotivasi masyarakat, agar mau mengadakan perubahan atau mau menerima inovasi yang ditawarkan kepada mereka sesuai dengan kebutuhannya.

5). Menterjemah tujuan ke dalam kegiatan; yaitu tokoh masyarakat hendaknya berusaha mempromosikan pelaksanaan program pembaharuan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat untuk bersama-sama merencanakan dan pelaksanaan tindakan-tindakan program pembaharuan.

6). Memantapkan adopsi, dan mencegah keterputusan; yaitu tokoh masyarakat (agen pembaru) dapat menjaga penerimaan ide-ide baru secara efektif dengan memberikan informasi atau pesan-pesan yang menunjang, sehingga masyarakat merasa aman dan tetap merasa yakin dalam melaksanakan pembaharuan tersebut.

7). Menghasilkan hubungan antara (terminal); yaitu tokoh masyarakat (agen pembaru) berusaha mengembangkan

kemampuan masyarakat untuk menjadikan dirinya sebagai agen pembaharu, yaitu dapat mengenali dan memilih inovasi-inovasi yang cocok untuk kebutuhannya sendiri. Dengan kata lain tokoh masyarakat harus berusaha mengubah masyarakat dari ketergantungannya pada pihak lain, menjadi percaya pada dirinya sendiri.

Peranan tokoh masyarakat tersebut, dapat berjalan dengan lancar, apabila memperhatikan pula peran-peran tokoh masyarakat lainnya yang sudah ada di masyarakat, di mana mereka sangat menentukan terhadap keberhasilan program pembaharuan yang diluncurkan kepada masyarakat. Tokoh masyarakat ini, oleh Everett M. Rogers dan F.Floyd Shoemaker disebut dengan pemuka pendapat (opinion leader) atau tokoh informal (Abdillah Hanafi, 1981; 111).

Para tokoh masyarakat tersebut, memainkan peranan penting dalam proses penyebaran inovasi. Mereka dapat mempercepat proses difusi, tetapi bisa pula mereka itu menghalangi dan menghancurkannya. Karena itu agen pembaru harus menaruh perhatian khusus kepada tokoh masyarakat pada sistem sosial di mana masyarakat tersebut berada.

Di daerah pedesaan pada umumnya, tokoh masyarakat sebagai opinion leader merupakan kunci utama untuk dapat masuk dan berkomunikasi dengan sistem sosial masyarakat tersebut. Oleh karena itu, program pembangunan di pedesaan tidak dapat mengabaikan peran tokoh masyarakat, sehingga keterlibatannya merupakan faktor yang mempengaruhi terhadap kelancaran program pembangunan tersebut.

2. Diskusi hasil wawancara tentang keterlibatan tokoh masyarakat dalam kegiatan program KB.

Ada beberapa masalah yang dapat direkam dari hasil wawancara dengan Camat, para Kades, Pengawas KKB dan sekertarisnya, dan beberapa tokoh masyarakat di kecamatan Kroya, kabupaten Cilacap, tentang tingkat pengetahuan dan pemahaman tokoh masyarakat terhadap program KB, alasan keinginterlibatan tokoh dalam kegiatan program KB, dan intensitas keterlibatannya dalam kegiatan program KB, yang perlu didiskusikan dalam kesempatan berikut ini. Masalah-masalah tersebut adalah sebagai berikut :

a. Tingkat pengetahuan dan pemahaman tokoh masyarakat tentang program KB, pada umumnya dapat dikatakan telah cukup memahami apa maksud dan tujuan dari program KB, namun pelaksanaannya masih belum secara aktif terlibat langsung dalam kegiatan program KB tersebut. Ada beberapa tokoh Agama yang masih menolak terhadap program KB, namun tidak secara terang-terangan.

Penolakan dari tokoh Agama terhadap program KB, didasarkan pada penafsiran terhadap ayat suci Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 151, dan Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, tentang Azl (mencabut alat kelamin ketika bersetubuh, agar air mani tumpah di luar), yaitu sebagai berikut : Judzamah binti Wah-b berkata:"Saya pernah melihat Rosulullah saw. di hadapan beberapa manusia sedang bersabda, bahwa sesungguhnya Beliau ingin melarang ghilah,

tetapi hal tersebut tidak membahayakan anak (dalam kandungan) mereka. Kemudian orang-orang bertanya kepada Rosulullah tentang azl, yang dijawab oleh Beliau, bahwa azl adalah pembunuhan anak yang tersembunyi."(A. Hassan, Bulughul Maram; 511-512).

Masalah tersebut, merupakan kendala bagi pemerintah setempat untuk menerobos dan menyebarluaskan program KB, di mana masih ada sebagian PUS yang belum dapat dikendalikan tingkat kelahirannya, karena mereka mengikuti aliran tokoh agamanya.

b. Secara umum, alasan tokoh masyarakat ingin terlibat dalam kegiatan program KB adalah alasan yang bersifat sosial, yaitu ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memotivasi dan mengajak masyarakat untuk masuk KB.

Ada kecenderungan perbedaan alasan tokoh masyarakat dalam keterlibatannya pada kegiatan program KB, namun tujuan yang ingin dicapai adalah sama, yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Kecenderungan tersebut adalah : (1) kecenderungan alasan yang bersifat politis, pada umumnya adalah para pejabat pemerintahan setempat yang secara langsung mempunyai tanggung jawab terhadap keberhasilan program KB, misalnya; Camat, para Kepala Desa, Pengawas KKB, PLKB, dan Dokter; (2) kecenderungan alasan yang bersifat sosial, pada umumnya adalah para tokoh masyarakat yang mempunyai latar belakang pekerjaan petani atau guru, yang pada umumnya lebih berorientasi kepada masyarakat; (3) kecenderungan alasan keagamaan, yang pada umumnya dijadikan alasan ingin terlibat dalam kegiatan program KB oleh

para tokoh agama.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa alasan tokoh masyarakat ingin terlibat dalam kegiatan program KB, berkaitan erat dengan status dan jabatan mereka di masyarakatnya. Hal tersebut mengimplikasikan bahwa pendekatan dalam melibatkan tokoh masyarakat dalam kegiatan program KB, mempunyai banyak dimensi, baik secara politis, agama, dan sosial maupun dimensi lain yang bersifat kultural edukatif.

c. Masalah keterlibatan tokoh masyarakat dalam kegiatan program KB, pada umumnya dapat dikatakan cukup aktif. Namun, apabila dilihat dari tugas dan tanggung jawab yang seharusnya dilakukan oleh tokoh masyarakat, maka tokoh formal cenderung lebih aktif dibandingkan dengan tokoh informal. Tokoh informal, keterlibatannya relatif masih kurang, karena merasa tidak terikat oleh tanggung jawab formal untuk melaksanakan program KB di masyarakatnya.

Keterlibatan tokoh informal dalam kegiatan program KB, pada umumnya lebih berkaitan dengan program-program pendidikan di masyarakat, misalnya pengajian-pengajian, kegiatan kelompok belajar, musyawarah, dan pendidikan-pendidikan keahlian lainnya. Bentuk keterlibatan lain yang bersifat konsepsional, yang cenderung banyak melibatkan tokoh-tokoh informal adalah dalam kegiatan musyawarah dalam lembaga LKMD atau LMD.

Peran tokoh masyarakat pada umumnya, diharapkan dapat menjembatani apa yang diharapkan oleh pemerintah, dan

apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Peran ini, oleh Everett M. Rogers (1983; 314) disebut sebagai penghubung atau Linkage. Peran sebagai penghubung atau juga sebagai komunikator, tokoh masyarakat diharapkan dapat menyampaikan pesan-pesan pembangunan sesuai dengan program pemerintah atau lembaga pengubah, dan dapat menyampaikan harapan-harapan masyarakat sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya kepada pemerintah. Demikian pula tokoh masyarakat diharapkan dapat menjadi motivator pembangunan yang kreatif, yaitu mampu mendorong dengan berbagai upaya agar masyarakat mau dan tertarik untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan pada umumnya, dan kegiatan KB pada khususnya.

Berkaitan dengan semakin meningkatnya PUS di kecamatan Kroya, berarti membutuhkan tenaga lapangan yang memadai. Petugas yang ada dan aktif di lapangan berjumlah 22 orang, yang terdiri dari Pengawas KKB kecamatan 1 orang, Staf KB Kecamatan Kroya 1 orang, PLKB 5 orang, PPKBD 14 orang dan dari Puskesmas 1 orang. Dengan keadaan yang demikian, dirasakan sangat kurangnya tenaga lapangan yang mampu memotivasi masyarakat untuk mau masuk program KB. Dengan demikian, diperlukan keterlibatan tokoh masyarakat dalam rangka meningkatkan kegiatan program KB di daerah pedesaan.

Keterlibatan tokoh informal (pada khususnya) yang diharapkan oleh pemerintah maupun masyarakat adalah dalam bentuk ide maupun tindakan nyata yang dapat dicontoh oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Bentuk keterlibatan dalam ide merupakan bentuk kegiatan konsepsional, yang dapat memberikan dasar-dasar pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap maksud dan tujuan pembangunan pada umumnya, dan program KB pada khususnya, serta memberikan konsep-konsep yang melandasi boleh atau tidaknya program KB dilaksanakan. Adapun jenis kegiatan ini dapat dilaksanakan dalam bentuk musyawarah desa, rapat-rapat dengan warga masyarakat, pengajian-pengajian rutin atau insidental, safari KB, PKK, dan bentuk-bentuk kegiatan pendidikan non formal lainnya.

Keterlibatan tokoh masyarakat dalam bentuk tindakan nyata di masyarakat adalah bentuk kegiatan yang dapat dilihat, dihayati, dan dicontoh bagaimana perilaku nyata itu dikerjakan. Tindakan nyata ini bukan sekedar memberikan rangsangan kepada masyarakat, tetapi juga memberikan motivasi kuat agar mau mencontoh bagaimana cara melakukan suatu inovasi secara tepat. Oleh karena itu, peran tokoh dalam bentuk ini, bukan hanya sekedar penyampai program semata, tetapi juga sekaligus melakukan sebagai alat dalam mengimplementasikan program perubahan/pembaharuan yang dirancang.

Bertolak dari ketiga permasalahan di atas, yaitu berkenaan dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman tokoh masyarakat pada umumnya dapat dikatakan cukup memahami terhadap maksud dan tujuan program KB; adanya kecenderungan tokoh masyarakat mempunyai alasan yang bersifat sosial dalam keterlibatannya pada kegiatan program KB, dan; intensitas

keterlibatan tokoh masyarakat pada umumnya terlibat aktif dalam kegiatan program KB, merupakan potensi yang cukup baik untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan keterlibatan tokoh masyarakat pada kegiatan program KB khususnya.

Tingkat pengetahuan dan pemahaman yang cukup, berarti tingkat kesadaran tokoh masyarakat sudah cukup tinggi terhadap pentingnya inovasi (khususnya program KB) untuk perbaikan taraf hidup yang lebih baik. Alasan tokoh masyarakat ingin terlibat dalam kegiatan program KB yang bersifat sosial, merupakan bentuk sikap positif yang menguntungkan difusi inovasi dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut berarti, orientasi keterlibatan tokoh masyarakat pada umumnya lebih ditujukan pada kegiatan kemasyarakatan yang didasarkan pada kepentingan bersama, tanpa memandang kepentingan pribadi atau golongan. Intensitas keterlibatan tokoh masyarakat yang cukup aktif, memberikan peluang yang besar terhadap kemungkinan suatu inovasi akan dapat diterima oleh masyarakat. Pada umumnya di daerah pedesaan yang relatif masih kurang maju, keterlibatan tokoh informal maupun formal sangat diperlukan dalam memacu kemajuan masyarakatnya. Keterlibatan tokoh masyarakat di pedesaan, tidaklah cukup dalam bentuk ide saja atau harta saja, atau tindakan saja, namun ketiganya bahkan dituntut menjadi satu keterlibatan yang penuh, yang akan mendorong masyarakat untuk mau menggunakan cara-cara baru untuk kehidupannya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka fungsi tokoh masyarakat dalam pembangunan di pedesaan pada khususnya dapat

dikelompokkan menjadi tiga, yaitu fungsi tanggap terhadap inovasi, fungsi mengharmonikan atau mengkomplementasikan atau fungsi pembinaan, dan fungsi pengarahan dalam bentuk tindakan nyata yang dapat dilakukan oleh masyarakat.

Berdasarkan data penelitian, bahwa intensitas keterlibatan tokoh formal cenderung lebih aktif dalam semua tahap kegiatan program KB, sedangkan tokoh informal lebih cenderung aktif pada kegiatan pemanfaatan program KB, khususnya dalam kegiatan penyebarluasan program KB dan NKKBS melalui berbagai kegiatan pendidikan nonformal. Masalah tersebut memberikan gambaran bahwa pendekatan yang digunakan oleh tokoh masyarakat untuk memasyarakatkan program KB ada dua pendekatan, yaitu pendekatan yang lebih berorientasi pada kepentingan pemerintah (sebagai lembaga perubahan) yang bersifat politis, dan pendekatan yang lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat, yang bersifat sosio-kultural edukatif.

Demikian pula intensitas keterlibatan tokoh masyarakat yang berbeda, menunjukkan adanya dua tipe kepemimpinan tokoh masyarakat, yaitu tipe cepat tanggap terhadap inovasi, dan yang kurang tanggap terhadap inovasi. Orientasi dari tipe yang kedua tersebut, disebut bersifat konservatif, dalam arti mempunyai sikap positif terhadap lembaga tradisional beserta prakteknya, dan berusaha memelihara status quo terhadap perubahan, sehingga cenderung menolak perubahan (Noeng Muhadjir, 1983; 23)

Adapun tipe kepemimpinan dari tokoh masyarakat yang cepat tanggap terhadap inovasi, dapat disebut pengadopsi potensial atau pemimpin adopsi inovasi.

Perbedaan kecenderungan intensitas keterlibatan antara tokoh formal dengan tokoh informal, selain menunjukkan perbedaan tipe kepemimpinan, juga menunjukkan perbedaan dalam tanggung jawab. Tokoh formal mempunyai tanggung jawab formal kepada pemerintah untuk melaksanakan program KB sesuai dengan perencanaan program, yang pada umumnya dibiayai oleh pemerintah. Untuk tahun anggaran 1988/1989 kecamatan Kroya memperoleh anggaran program KBN, sebesar Rp. 3158000,- (tiga juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah). Sedangkan tokoh informal mempunyai tanggung jawab moral untuk melaksanakan program KB secara suka rela, tanpa mengharapkan imbalan, sehingga keterlibatan tokoh informal masih sangat kurang. Oleh karena itu ada kemungkinan faktor insentif dapat mempengaruhi terhadap intensitas keterlibatan tokoh masyarakat dalam kegiatan program KB.

3. Diskusi hasil angket penelitian.

Berdasarkan hasil pengolahan angket mengenai tingkat pengetahuan dan pemahaman tokoh masyarakat terhadap program KB, alasan tokoh masyarakat ingin terlibat dalam kegiatan program KB, dan intensitas keterlibatan tokoh masyarakat terhadap program KB, dapat ditemukan beberapa masalah yang perlu didiskusikan, yaitu sebagai berikut :

a. Deskripsi kecenderungan umum tingkat pengetahuan dan pemahaman tokoh masyarakat terhadap program KB,

menunjukkan bahwa tokoh masyarakat pada umumnya cukup memahami terhadap maksud dan tujuan program KB. Gambaran tersebut, menunjukkan adanya potensi yang cukup menunjang terhadap pelaksanaan program KB di kecamatan Kroya. Potensi ini juga ditunjang dengan kecenderungan umum tokoh masyarakat tentang alasan ingin terlibat dalam kegiatan program KB, yaitu alasan yang bersifat sosial, artinya mereka ingin terlibat dalam kegiatan program KB adalah untuk kepentingan masyarakat. Demikian pula intensitas keterlibatan tokoh masyarakat dalam kegiatan program KB, menunjukkan intensitas yang aktif terlibat.

Secara umum, gambaran tersebut menunjukkan adanya potensi yang dapat dikembangkan dan ditingkatkannya keterlibatan tokoh masyarakat, baik formal maupun informal ke arah yang lebih intensif. Adanya kecenderungan tokoh formal lebih aktif keterlibatannya dari pada tokoh informal, menunjukkan bahwa keterlibatan langsung dan pemberian tugas secara langsung, akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman, meningkatkan motivasi keterlibatannya, dan meningkatkan intensitas keterlibatan tokoh masyarakat dalam kegiatan program KB.

Kurangnya keterlibatan tokoh informal, berkaitan dengan peranan dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan program KB tersebut. Apabila peranan dan tanggung jawab tersebut tidak jelas, akan mempengaruhi terhadap kegiatan yang akan dilakukanya. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk

meningkatkan keterlibatan tokoh masyarakat, adalah memberikan peranan yang jelas dengan melalui koordinasi dari pimpinan daerah atau dari pengawas KKB Kecamatan. Peningkatan peran ini akan mempengaruhi secara psikologis, sosiologis, maupun politis dalam kegiatan program KB. Pengaruh psikologis terhadap tokoh masyarakat, berarti mereka merasa diakui dan dihargai kepemimpinannya di masyarakat. Hal ini yang oleh Maslow (1962; 76) disebut dengan "Belongingness and love needs, contoh ; afeksi dan identifikasi, dan Esteem needs, contoh prestise, kesuksesan, dan harga diri." Pengaruh secara sosiologis mempunyai arti bahwa tokoh masyarakat diakui kepemimpinannya, sehingga status sosialnya tidak merasa diabaikan. Sedangkan pengaruh secara politis, mempunyai arti bahwa program KB dapat dilaksanakan dengan melibatkan semua unsur masyarakat, dan faktor pimpinan masyarakat dapat dikendalikan secara koordinatif.

b. Rata-rata tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap program KB, antara tokoh masyarakat formal dengan tokoh informal, tidak terdapat perbedaan yang berarti. Hal tersebut menunjukkan, bahwa baik tokoh formal maupun informal mempunyai persepsi yang secara umum sama dalam memahami maksud dan tujuan program KB. Apabila dilihat dari latar belakang pekerjaan tokoh masyarakat, maka terdapat kecenderungan yang berbeda antara tokoh agama, tokoh pemerintahan, dan tokoh masyarakat biasa (umum), dalam alasan ingin terlibat dalam kegiatan program KB.

Kecenderungan alasan tokoh agama ingin terlibat dalam kegiatan program KB adalah alasan yang bersifat keagamaan, di mana keinginterlibatannya adalah didasarkan pada kepentingan agama. Alasan tokoh pemerintahan dalam keinginterlibatannya pada kegiatan program KB adalah bersifat politis, di mana mereka berorientasi pada tugas dan tanggung jawab program pemerintah yang harus dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Sedangkan tokoh masyarakat biasa (umum), cenderung mempunyai alasan ingin terlibat dalam kegiatan program KB adalah alasan yang bersifat sosiologis, yaitu mereka berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Masalah tersebut menggambarkan, bahwa dalam pelaksanaan program KB di masyarakat, tokoh masyarakat mempunyai cara pendekatan yang berbeda-beda, sesuai dengan tingkat pengetahuan dan pemahamannya terhadap program KB, alasan dan tujuan keterlibatannya dalam kegiatan program KB, dan peranan dan tanggung jawabnya terhadap kelancaran pelaksanaan program KB tersebut di masyarakat.

c. Penemuan yang diperoleh berdasarkan pengujian tingkat signifikansi hubungan antara dua variabel, adalah bahwa jenis pekerjaan tokoh masyarakat mempunyai hubungan yang signifikan terhadap tingkat pengetahuan dan pemahamannya terhadap program KB, terhadap alasan keinginterlibatannya, dan terhadap intensitas keterlibatannya dalam kegiatan program KB.

Ada beberapa alasan yang dapat diungkap mengapa jenis pekerjaan dapat mempengaruhi ketiga variabel tersebut.

Alasan-alasan tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1). Dilihat dari jenis pekerjaan yang mempunyai kecenderungan terbanyak adalah pegawai non guru, yaitu sebanyak 40 orang atau 40 % dari sampel. Dari 40 orang tersebut, 33 orang adalah termasuk tokoh formal atau 82,50 %nya tokoh formal dan sisanya adalah tokoh informal. Hal ini berarti sebagian besar pegawai non guru adalah terlibat langsung dalam kegiatan program KB, yang minimal mereka telah memahami terhadap masalah-masalah program KB, dan mempunyai dorongan yang kuat untuk lebih aktif dalam kegiatan program Keluarga Berencana.

2). Dilihat dari tingkat pendidikannya, maka sebagian besar dari 40 orang tersebut adalah berpendidikan SLA, yaitu sebesar 22 orang atau 55 %nya berpendidikan SLA dan Perguruan Tinggi, 11 orang atau 27,50 %nya berpendidikan SLP, dan 7 orang atau 17,50 %nya berependidikan rendah (SD).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka jelas bahwa jenis pekerjaan mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengetahuan dan pemahaman tokoh masyarakat terhadap program KB, terhadap alasan keinginterlibatan tokoh dalam kegiatan program KB, dan terhadap intensitas keterlibatan tokoh masyarakat dalam kegiatan program KB, karena variabel jenis pekerjaan yang dominan ini terdiri atas sebagian besar adalah tokoh formal yang terlibat langsung dalam kegiatan program KB, dan mempunyai tingkat pendidikan yang memadai.

Berdasarkan hasil-hasil temuan di atas, maka ada tiga hal yang saling berkaitan antara yang satu dengan lainnya, yaitu tingkat kelahiran yang belum mencapai sasaran/ target, pasangan usia subur yang masih belum dapat dikendalikan seluruhnya, dan masih kurang aktifnya keterlibatan tokoh informal dalam kegiatan program KB. Permasalahan tersebut, mengimplikasikan perlunya pemerintah setempat untuk melibatkan tokoh masyarakat informal dalam kegiatan program KB pada khususnya, dalam bentuk kegiatan-kegiatan perencanaan, pelaksanaan di lapangan, maupun kegiatan penunjang yang sifatnya pendidikan non formal.

Peningkatan keterlibatan tokoh masyarakat melalui pemberian peranan yang jelas terhadap tugasnya, akan mempengaruhi terhadap upaya-upaya pelaksanaan dan peningkatan hasil program KB di kecamatan Kroya, kabupaten Cilacap pada khususnya.

B. Kesimpulan hasil-hasil penelitian.

Berdasarkan hasil-hasil temuan yang telah didiskusikan di atas, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Ada tiga pokok masalah yang dapat diungkap dari hasil penelitian, yaitu : a). Belum tercapainya sasaran tingkat kelahiran anak menjadi 11/1000, karena masih adanya PUS yang belum dapat dikendalikan kelahirannya, dan yang belum masuk menjadi akseptor KB, yaitu sebesar 25,62%. b). Terdapatnya potensi tokoh masyarakat, untuk mampu memotivasi dan mengajak masyarakat masuk program KB.

Potensi tersebut adalah adanya kecenderungan umum tingkat pengetahuan dan pemahaman tokoh terhadap program KB, yang menunjukkan cukup memahami terhadap maksud dan tujuan program KB, kecenderungan umum alasan tokoh ingin terlibat dalam kegiatan program KB, yang berorientasi pada alasan sosial, dan adanya kecenderungan umum intensitas keterlibatan tokoh masyarakat yang menunjukkan cukup aktif terlibat, dan c). Dibandingkan dengan tokoh formal, maka secara khusus kecenderungan intensitas keterlibatan tokoh informal dapat dikatakan masih kurang aktif.

Ketiga persoalan tersebut, menggambarkan adanya kaitan erat antara yang satu dengan lainnya, yaitu bahwa belum tercapainya target program KB dan masih adanya hambatan penjaringan PUS untuk menjadi akseptor KB, yang mengakibatkan tidak terkendalikannya tingkat kelahirannya, mempunyai kaitan erat dengan belum dimanfaatkannya potensi tokoh informal secara optimal, sehingga mengakibatkan keterlibatan tokoh informal masih kurang aktif.

2. Faktor-faktor yang diasumsikan berkontribusi terhadap intensitas keterlibatan tokoh masyarakat dalam kegiatan program KB adalah : tingkat pengetahuan dan pemahaman tokoh masyarakat terhadap program KB, alasan tokoh masyarakat ingin terlibat dalam kegiatan program KB, tingkat pendidikan tokoh masyarakat, dan jenis pekerjaan tokoh masyarakat. Namun dari keempat faktor tersebut, yang mempunyai hubungan signifikan terhadap tingkat pengetahuan dan

pemahaman tokoh tentang program KB, dan terhadap intensitas keterlibatan tokoh masyarakat dalam kegiatan program KB, adalah faktor jenis pekerjaan. Demikian pula jenis pekerjaan mempunyai tingkat hubungan yang cukup kuat terhadap alasan tokoh masyarakat ingin terlibat dalam kegiatan program KB.

Hasil analisis membuktikan bahwa jenis pekerjaan yang mendominasi intensitas keterlibatan tokoh masyarakat dalam kegiatan program KB adalah pegawai non guru. Intensitas keterlibatan pegawai non guru mempunyai kecenderungan umum yang aktif (sering dan sangat sering) terlibat dalam kegiatan program KB. Sebagian besar yang mendominasi pegawai non guru adalah tokoh-tokoh masyarakat formal yang pekerjaannya berkaitan langsung dengan masalah program KB, yaitu sebesar 82,50 % dari 40 pegawai non guru. Demikian pula sebagian besar dari pegawai non guru yang mempunyai intensitas keterliabatan aktif, mempunyai tingkat pendidikan SLTA dan PT, yaitu sebesar 55 %.

Dengan demikian dapat dinyatakan, bahwa untuk meningkatkan intensitas keterlibatan tokoh masyarakat dalam kegiatan program KB adalah dengan cara melibatkan tokoh masyarakat secara langsung dalam kegiatan program KB, dan dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan yang memadai untuk kepentingan kegiatan berkomunikasi di masyarakat.

3. Terdapatnya kecenderungan-kecenderungan yang bersifat spesifik, baik mengenai alasan maupun dalam intensitas

keterlibatan tokoh masyarakat di dalam kegiatan program KB. Kecenderungan-kecenderungan dalam alasan tokoh masyarakat ingin terlibat dalam kegiatan program KB, adalah sebagai berikut :

a. Tokoh-tokoh agama mempunyai kecenderungan alasan yang bersifat keagamaan dalam keinginterlibatannya pada kegiatan program KB.

b. Tokoh-tokoh masyarakat umum (misalnya; guru, petani, pedagang atau wiraswastawan), mempunyai kecenderungan alasan yang bersifat sosial dalam keinginterlibatannya pada kegiatan program KB.

c. Tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai jabatan dalam pemerintahan atau yang mempunyai tugas langsung dalam kegiatan program KB, cenderung mempunyai alasan yang bersifat politis, yaitu orientasinya adalah melaksanakan dan menyukseskan program pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Adapun kecenderungan-kecenderungan spesifik dalam intensitas keterlibatan tokoh pada kegiatan program KB, adalah sebagai berikut :

a. Intensitas keterlibatan tokoh masyarakat formal dalam kegiatan program KB, cenderung mempunyai keterlibatan yang aktif pada setiap tahap kegiatan program KB, yaitu baik pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan, maupun pada tahap pemanfaatan.

b. Intensitas keterlibatan tokoh masyarakat informal dalam kegiatan program KB, cenderung lebih aktif pada

kegiatan pemanfaatan program KB. Kegiatan ini berorientasi pada kegiatan-kegiatan pendidikan kemasyarakatan atau kegiatan penyebarluasan/pemasyarakatan program KB melalui pendidikan non formal.

Demikianlah beberapa kesimpulan yang dapat diungkapkan berdasarkan hasil-hasil temuan yang telah didiskusikan di atas, sehingga dapat memberikan gambaran secara umum tentang hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi intensitas keterlibatan tokoh masyarakat dalam kegiatan program KB di kecamatan Kroya, kabupaten Cilacap Jawa Tengah.

C. Rekomendasi/saran-saran.

Rekomendasi yang disampaikan di bawah ini, akan bertolak dari permasalahan yang ditemukan dan alternatif pemecahannya berdasar pada landasan teori yang digunakan. Rekomendasi disampaikan kepada pejabat pemerintahan di kecamatan Kroya yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program KB, para tokoh masyarakat di kecamatan Kroya, dan kepada para calon peneliti yang berminat untuk melanjutkan penelitian ini atau penelitian yang berkaitan dengan masalah ini.

1. Rekomendasi untuk para pejabat pemerintahan di kecamatan Kroya, kabupaten Cilacap Jawa Tengah.

Dengan tidak mengabaikan upaya-upaya yang telah dicapai oleh para tokoh masyarakat pada umumnya dan para pejabat pemerintahan di kecamatan Kroya pada khususnya,

tentang pelaksanaan program KB, penelitian ini menemukan beberapa masalah yang perlu mendapat perhatian dan alternatif pemecahannya.

Masalah-masalah tersebut adalah : laju pertumbuhan penduduk kecamatan Kroya tahun 1988/1989 sebesar 0,58 %, yang berarti di atas laju pertumbuhan penduduk tingkat kabupaten Cilacap tahun sebelumnya, yaitu sebesar 0,24 %; tingkat kelahiran yang masih perlu dikendalikan, sebab tingkat kelahiran di kecamatan Kroya tahun 1988/1989 sebesar = 1142/83681 x 100 % = 1,36 %, yang berarti di atas tingkat kelahiran pada tingkat kabupaten Cilacap tahun sebelumnya, yaitu sebesar 0,72 %; masih adanya PUS yang belum dapat diantisipasi kelahirannya dan belum masuk menjadi akseptor KB; kepadatan penduduk yang sudah cukup kritis; tingkat pendapatan perkapita yang pada umumnya relatif masih rendah.

Masalah-masalah tersebut adalah masalah kependudukan yang tidak bisa dilepaskan dengan masalah program KB, artinya keberhasilan program KB akan mempengaruhi terhadap permasalahan kependudukan. Keberhasilan tujuan program KB sebagai salah satu inovasi dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, tidak bisa mengabaikan peranan tokoh masyarakat dalam pelaksanaannya di lapangan.

Permasalahan di atas menunjukkan betapa pentingnya program KB sebagai salah satu alternatif pemecahan. Namun program itu tanpa bisa bicara apapun, apabila para pelaksana di lapangan mengabaikan nilai-nilai sosio-kultural

yang ada di masyarakat, sistem kepemimpinan yang ada di masyarakat, dan kondisi sosial-ekonomis yang terdapat di masyarakat tersebut. Pengabaian nilai-nilai tersebut, berarti semakin sulit program KB dapat diterima oleh masyarakat.

Salah satu aspek yang erat kaitanya dengan masalah-masalah yang ditemukan di atas, adalah kurangnya keterlibatan tokoh informal dalam kegiatan program KB. Pada hal tokoh informal merupakan salah satu sub sistem dari sistem kepemimpinan yang ada di masyarakat. Dengan demikian, pelibatan tokoh masyarakat informal dalam kegiatan program KB secara langsung, akan menunjang terhadap pelaksanaan program KB di masyarakat.

Pelibatan tokoh masyarakat informal dalam kegiatan program KB secara langsung, mengandung implikasi terhadap peningkatan peran tokoh masyarakat, yaitu di samping sebagai pemuka pendapat (opinion leader), juga dapat menjadi agen perubahan (agent of change). Untuk meningkatkan peran kepada tokoh informal, para pejabat pemerintahan di kecamatan Kroya dapat melakukan dengan mengikut sertakan tokoh masyarakat dalam setiap tahap kegiatan program KB, di mana pada umumnya tokoh masyarakat telah mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang cukup terhadap masalah program KB dan mempunyai alasan ingin terlibat yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Alternatif lain dalam meningkatkan peran tokoh masyarakat pada kegiatan pemasyarakatan program KB, adalah

melalui kegiatan PLS atau Pendidikan Luar Sekolah. Kegiatan ini mempunyai fungsi ganda, yaitu selain meningkatkan pengetahuan, sikap dan nilai-nilai, dan keterampilan yang dapat membekali kehidupannya di masyarakat, juga dalam rangka memperkenalkan ide-ide baru, serta mendorong dan mengajak untuk mengambil inovasi sebagai alternatif pemecahan dalam mengatasi permasalahan di masyarakat.

Bentuk-bentuk pendidikan luar sekolah yang dapat dilaksanakan di masyarakat, bukan terbatas pada kelompok-kelompok belajar, tetapi dapat pula berbentuk kelompok arisan, rapat RT/RW/RK, koperasi, pengajian rutin/insidental, dan kegiatan-kegiatan lain yang di dalam prosesnya terjadi proses pembelajaran warga masyarakat. Di kecamatan Kroya pada khususnya, dan Jawa Tengah pada umumnya, ada kegiatan kemasyarakatan yang berbentuk gotong royong dalam memindahkan rumah atau gotong royong dalam "mendirikan" (ngadegna dalam istilah Banyumas) rumah, yang mempunyai nilai pendidikan luar sekolah yang sangat praktis dan efektif.

Alternatif dalam mengatasi masalah kependudukan di atas, selain peningkatan kegiatan program KB, peningkatan pelibatan tokoh-tokoh informal dalam kegiatan program KB secara langsung, kegiatan-kegiatan pendidikan luar sekolah, juga melalui peningkatan program transmigrasi, penyaluran tenaga-tenaga kerja Indonesia (TKI) melalui koordinasi pemerintah setempat, mengembangkan bidang-bidang kerajinan yang sudah ada, mengembangkan industri-industri rumah tangga

atau industri-industri kecil yang menghasilkan alat-alat rumah tangga atau menghasilkan cindera mata. Produksi ini akan dapat dipasarkan di daerah-daerah wisata, misalnya pantai Ayah (Logending), pantai Widara Payung, Gunung Serandil, Gua Jatijajar, Waduk Sempor, Batu Raden, dan tempat-tempat wisata lainnya yang masih berdekatan dengan kecamatan Kroya, kabupaten Cilacap.

2. Rekomendasi/saran-saran untuk para tokoh masyarakat di kecamatan Kroya, kabupaten Cilacap.

Hasil temuan penelitian menunjukkan adanya potensi tokoh masyarakat untuk dapat dikembangkan dalam bentuk keterlibatan pada kegiatan-kegiatan program KB pada khususnya, dan program pembangunan masyarakat pada umumnya. Potensi tersebut ditunjukkan dari hasil temuan yang menggambarkan bahwa pada umumnya tokoh masyarakat mempunyai tingkat pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang program KB, mempunyai alasan yang bersifat sosial dalam keinginterlibatannya dalam kegiatan program KB, dan adanya hubungan yang signifikan antara jenis pekerjaan dengan intensitas keterlibatannya dalam kegiatan program KB.

Temuan tersebut, mempunyai implikasi bahwa tokoh masyarakat mempunyai potensi yang cukup besar untuk dapat mengembangkan dirinya dalam keterlibatannya dengan kegiatan program KB pada khususnya dan kegiatan pembangunan pada umumnya. Dengan melibatkan diri dalam berbagai kegiatan pembangunan, berarti membuka diri dari keterbelengguan tradisi dan menerima ide-ide baru yang baik dan sesuai dengan

nilai-nilai sistem sosial yang ada serta sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Selain potensi tersebut di atas, ada beberapa masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan program KB, yaitu masih ada sebagian kecil tokoh masyarakat yang menolak KB sebagai metode pengaturan kelahiran anak, dan adanya kecenderungan tokoh informal masih kurang terlibat dalam kegiatan program KB.

Tokoh masyarakat yang menolak terhadap program KB, mempunyai alasan yang didasarkan pada Al-Qur'an surat Al-An'am, ayat 151, yang artinya sebagai berikut :"Katakanlah ! Marilah kubacakan apa-apa yang telah diharamkan Tuhan kepadamu, yaitu : Janganlah kamu mempersekutukan Dia dengan sesuatupun, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rizki kepadamu, dan kepada mereka juga. Janganlah kamu mendekati perbuatan keji yang terang maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu bunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh syari'at, Begitulah yang diperintahkan Tuhan kepadamu, supaya kamu memikirkannya." Hadits yang digunakan sebagai penolakan program KB adalah Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, yang artinya sebagai berikut :"Dari Judzamah binti Wah-b, Ia berkata : Saya pernah lihat Rasululloh saw. di hadapan beberapa manusia dan Ia sedang

bersabda: Sesungguhnya aku berkemauan hendak melarang ghilah (mencampuri isteri yang hamil), maka aku lihat orang-orang Rum dan Farsi melakukan ghilah, tetapi yang demikian tidak sekali-kali membahayakan anak mereka ". Kemudian mereka bertanya kepadanya tentang azl; maka Rasululloh saw. bersabda : yang demikian (adalah) pembunuhan anak yang tersembunyi."

Berkaitan dengan kedua dalil tersebut, tentunya akan lebih sempurna apabila para tokoh masyarakat yang masih menolak program KB untuk mempelajari lebih luas tentang penafsiran dari ayat dan hadits tersebut, serta dilengkapi dengan ayat-ayat lain dan hadits yang lain. Salah satu Hadits yang berkaitan dengan hadits di atas adalah: Dari Abi Said Al-Khudri, bahwasanya seorang laki-laki berkata : Ya Rasulullah ! saya mempunyai seorang jariyah, dan saya azl dari padanya, karena saya tidak suka ia hamil, sedang saya ingin apa yang laki-laki ingini, tetapi orang-orang Yahudi beromong-omong bahwa azl itu pembunuhan kecil bagi anak perempuan. Sabdanya; Dusta orang Yahudi! Jika Allah mau jadikan dia, niscaya engkau tidak berdaya memalingkannya". (A. Hassan, Bulughul Maram; 511-512).

Selain hadits tersebut, juga ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang bagaimana kita harus mengatur keluarga yang sejahtera, yaitu antara lain : surat Ar-Ra'du ayat 11, surat Attahrim ayat 6, surat Al-Qashash ayat 77, dan surat An-Nisaa ayat 9.

Kekurangterlibatan tokoh informal dalam kegiatan program KB, mempunyai dampak terhadap kurangnya warga masyarakat masuk program KB. Masalah ini berkaitan dengan sistem yang ada pada masyarakat kita pada umumnya, yang masih memegang pola panutan kepada para pemimpinnya. Oleh karena itu peranan tokoh masyarakat baik formal maupun informal di masyarakat, masih sangat penting dan mempunyai status sosial yang tinggi.

Keterlibatan tokoh informal dalam kegiatan program KB mempunyai peranan ganda, yaitu selain sebagai pemuka pendapat, juga sebagai "penyambung lidah" dari pemerintah atau yang disebut sebagai agent of change (agen perubahan).

Tugas dari kedua peranan tersebut, bukan sekedar sebagai seorang penasehat atau nara sumber, tetapi sekaligus sebagai contoh dalam pelaksanaan di lapangan. Sebagai pemuka pendapat, tokoh informal hendaknya mampu memberikan penjelasan yang jujur dan rasional sesuai dengan keahliannya. Sedangkan sebagai change agent, tokoh informal hendaknya dapat mempelajari masalah yang dihadapi masyarakat, kebutuhan-kebutuhannya, dan alternatif pemecahannya. Oleh karena itu menurut Everett M.Rogers (1983; 315-316) sebagai change agent harus mampu mempengaruhi keputusan inovasi dari warga masyarakat, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Membangkitkan kebutuhan untuk berubah,

b. Mengadakan hubungan untuk perubahan,

c. Mendiagnosis masalah,

d. Mendorong atau menciptakan motivasi untuk berubah pada diri klien atau masyarakat,

e. Merencanakan tindakan atau menterjemah tujuan ke dalam tindakan/kegiatan,

f. Memantapkan adopsi, dan mencegah keterputusan,

g. Mencapai hubungan terminal/antara.

Program Keluarga Berencana mempunyai tujuan meningkatkan kualitas kehidupan bangsa dalam rangka mencapai kesejahteraan material maupun spiritual. Implikasi dari tujuan ini adalah kita harus mengatur generasi yang ada dan yang akan datang, baik dalam jumlah, kualitas manusianya, makanan yang bergizi, pemukimannya, pendidikannya, lahan penghidupannya, dan berbagai faktor lainnya. Permasalahan ini bukan merupakan tanggung jawab pemerintah belaka, tetapi tokoh masyarakat mempunyai tanggung jawab langsung kepada warganya di mana ia bertempat tinggal. Tanggung jawab utama dari tokoh masyarakat adalah mempersiapkan generasi muda yang akan menggantikan generasi tua. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi yang artinya : Kamu semua adalah pemimpin (penggembala), dan setiap pemimpin akan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya.

Salah satu alternatif keterlibatan tokoh informal pada khsusnya, dalam mengatasi masalah kependudukan adalah dalam bentuk kegiatan-kegiatan nyata sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri, yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengatasi

permasalahannya sendiri. Adapun bentuk-bentuk kegiatannya antara lain :

a. Peningkatan usaha tani, yaitu dari mulai penanaman, pemeliharaan, dan sampai dengan pasca panen.

b. Penyuluhan peningkatan produksi gula merah. Hal ini merupakan potensi yang cukup besar untuk dikembangkan di kecamatan Kroya, sebab selama ini berjalan secara tradisional, sehingga apabila tidak ditangani secara profesional dikhawatirkan produksi menurun, dan pohonnya akan cepat rusak. Oleh karena itu para tokoh masyarakat diharapkan secepatnya untuk mengatasi masalah produksi gula merah dari kelapa, dari mulai cara pengambilan air nira, pengolahan produksi, pemasaran (yang sampai sekarang masih ditangani oleh para tengkulak), sampai dengan pemeliharaan pohon kelapa.

c. Pengembangan industri rumah tangga. Selama ini industri rumah tangga berjalan secara turun temurun, sehingga dari mulai cara pengolahan sampai dengan pemasaran produksi tanpa menggunakan menejemen yang baik, dan dampaknya tidak mengalami perbaikan hasil. Hal-hal yang berkaitan dengan usaha peningkatan produksi industri, dapat meminta bantuan tenaga ahli kepada Departemen Perindustrian.

d. Peningkatan pendidikan-pendidikan luar sekolah yang sudah ada, misalnya pengajian rutin, PKK, KBPD, KBU, Kelompok Akseptor KB, KB Tani, dan kursus-kursus lainnya, dengan memanfaatkan para ahli atau para sarjana yang sesuai dengan bidangnya, serta tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai

keahlian yang dibutuhkan. Dalam kegiatan tersebut, tokoh masyarakat memegang peran menjadi koordinator kegiatan dan sebagai penghubung antara kebutuhan masyarakat dengan pesan-pesan pembangunan yang diharapkan oleh pemerintah.

Bagaimana untuk dapat menyelenggarakan kegiatan tersebut di atas ? Pendekatan yang disarankan adalah pendekatan pendidikan non formal, di mana pendekatan ini lebih menekankan pada perubahan manusianya, baik perubahan mentalnya, sistem nilai budayanya, pengetahuan dan keterampilannya. Adapun proses untuk merancang dan melaksanakan kegiatan-kegiatan belajar, dapat diikuti melalui tahapan-tahapan berikut ini :

a. Merancang suasana belajar, yang meliputi tiga kegiatan, yaitu: mempersiapkan bahan-bahan dan kegiatan-kegiatan belajar, mengatur sarana dan prasarana, dan mempersiapkan pelaksanaan.

b. Menetapkan struktur untuk setiap rancangan, yaitu menentukan bentuk-bentuk kegiatan belajar yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan warga belajar.

c. Mendiagnosa/mengenali kebutuhan-kebutuhan belajar dari warga belajar, yang prosesnya ada tiga tahap, yaitu : 1) mengembangkan model perilaku/kemampuan yang diinginkan, 2) menilai kemampuan yang telah dimiliki dari masing-masing individu, dan 3) menilai perbedaan antara model yang dikembangkan dengan kemampuan yang dimiliki/diperoleh.

d. Merumuskan tujuan belajar.

e. Merancang pola/bentuk pengalaman belajar, yang menyangkut prinsip-prinsip organisasi kurikulumnya, model-model rancangan belajarnya.

f. Mengelola pengalaman belajar, yaitu berkaitan dengan tehnik yang digunakan dan bahan-bahan belajar serta alat-alatnya.

g. Menilai hasil dan mendiagnosa kembali kebutuhan belajar warga belajar. (Malcolm S. Knowles, 1977; 54)

Rancangan tersebut tentunya perlu dijabarkan kembali, disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan dari masing-masing lembaga, dalam menyelenggarakan pendidikan non formal sesuai dengan jenis dan bentuk pendidikannya.

3. Rekomendasi untuk para peneliti.

Bagi para calon peneliti yang berminat melanjutkan penelitian ini, perlu difahami bahwa penelitian deskriptif ini terbatas pada tujuan mengungkapkan faktor-faktor yang diasumsikan mempunyai hubungan signifikan dengan intensitas keterlibatan tokoh masyarakat dalam kegiatan program Keluarga Berencana di kecamatan Kroya Kab. Cilacap Jateng.

Faktor-faktor yang khusus diteliti adalah tingkat pengetahuan dan pemahaman tokoh masyarakat terhadap program KB, alasan tokoh ingin terlibat dalam kegiatan program KB, tingkat pendidikan tokoh masyarakat, dan jenis pekerjaan tokoh masyarakat. Tentunya apa yang dihasilkan dari penelitian ini sangat erat kaitannya dengan tujuan dan instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan berbagai informasi

yang dibutuhkannya. Oleh karena itu, apabila ada calon peneliti yang berminat untuk melanjutkan penelitian ini, perlu dipertimbangkan kembali pembatasan masalahnya, sampel yang perlu diperluas, tehnik pengumpulan datanya, dan instrumen yang cukup efektif dan efisien sebagai alat pengumpul data.

Penelitian ini baru menemukan salah satu variabel yang mempunyai kecenderungan berpengaruh terhadap intensitas keterlibatan tokoh masyarakat dalam kegiatan program KB, yaitu variabel jenis pekerjaan. Namun variabel tersebut belum menggambarkan dominan tidaknya pengaruh terhadap intensitas keterlibatan tokoh masyarakat dalam kegiatan program KB. Hal ini perlu diteliti kembali dan diuji kembali dengan alat dan metode statistika yang tepat.

Ada baiknya para calon peneliti yang akan datang, dapat memperluas jangkauan penelitian baik populasi dan sampelnya, maupun variabelnya, yaitu dengan melihat bagaimana kemungkinan pengaruh dari variabel status sosial ekonomi tokoh masyarakat, variabel insentif, dan umur serta jenis kelamin terhadap intensitas keterlibatan tokoh masyarakat dalam kegiatan program KB pada khususnya dan program pembangunan di pedesaan pada umumnya.

Berdasarkan penelitian ini, ada beberapa hal yang menurut asumsi peneliti merupakan masalah yang esensial dan potensial untuk diteliti, yaitu tentang faktor-faktor apa yang mempengaruhi masyarakat kecamatan Kroya pada khususnya lambat berkembang dalam mengikuti pembangunan.

Demikianlah beberapa rekomendasi atau saran-saran yang dapat disampaikan dalam kesempatan ini, yang masih perlu dipertimbangkan kembali manfaat dan kesesuaiannya, sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi tambahan dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan proses pembangunan di bidang kependudukan pada umumnya, dan program Keluarga Berencana pada khususnya di kecamatan Kroya, kabupaten Cilacap Jawa Tengah.

Mudah-mudahan hasil penelitian ini dapat menjadi hikmah bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan sebagai sumbangan kecil dalam rangka mengembangkan pendidikan luar sekolah pada khususnya untuk masyarakat pedesaan yang sangat membutuhkan perbaikan taraf kehidupan.

Semoga Allah SWT, selalu memberikan petunjuk dan ridoNya kepada jalan yang benar, Amien.